

**FUNGSI DAN TUGAS KEPOLISIAN DITINJAU
DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
DAN APLIKASINYA DI WILAYAH HUKUM
POLRES LOMBOK BARAT**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

HASANUDDIN
NPM : 0873 0339/FH/2000

**FAKULTASN HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2004

**Fungsi dan Tugas Kepolisian Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 2
Tahun 2002 dan Aplikasinya di Wilayah Hukum POLRES Lombok Barat**

Oleh :

HASANUDDIN

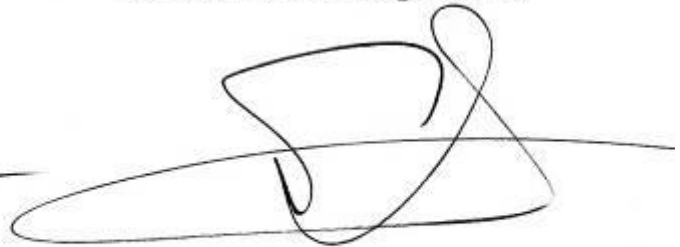
Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama



ABDUL MUHID, SH, MH.

Dosen Pembimbing Kedua



L. SUPRIANDI, SH, MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2004

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas kepolisian negara republik Indonesia sebagai mana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena adanya faktor-faktor yang menjadi penghambatnya yaitu : sumber data personil/aparatnya yang masih kurang (kuantitas maupun kualitas), terbatasnya atau berkurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dana operasional dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja polisi.
2. Bahwa tugas dan fungsi kepolisian Di POLRES Lombok Barat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat masih memprihatinkan dan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh aparat polisi POLRES Lombok Barat, Artinya bahwa masyarakat di wilayah hukum POLRES Lombok Barat memandang kinerja aparat kepolisian dalam penegakkan hukum kurang baik. Sedangkan tugas dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sudah cukup baik.